180/B.K./B/III.

KUTIPAN, dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Esbudayaan Republik Indonesia.

JAKARTA, 30 Juli 1964.

MENTERT PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBAGA

1 D . S . B .

MENIMBANG

: D . S . B .

MENG INGAT

1 D . S . B .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Partenn

: ne mbuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama ,selanjutnya disingkat SF. Negara, ditempat seperti tercantum dalem lempiran I keputusan ini;

Kedua

: nemecah SNP.Negara ditempat-tempat seperti tercantum dalam lampiran II keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri baik organisatoris administratif maupun dibidang teknik kependidikan.

Ketien

: menegerikan SEP.swasta ditempat-tempat seperti tercantum dalam lampiran III keputusan ini menjadi SMP.Negara setempat;

Keemnao

- : Terhadap pa sal-pasal "Pertama", "Kedua", dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan? sebagai berikut;
 - Selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D.dank. belum bisa 1.a). menyediakan ,maka gedung, halaman sekolah ,mebiler dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin atau dicukupi oleh Panitja atau Yayagan atau Pemerintah Daerah setempat.
 - Segala penagihan? yang bersifat keperdataan termasuk perjanjian b). hutang-hutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitya atau Yayasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini. tetap menjadi tanggungan Panitya Selfolah atau Yayasan atau Pemerintah yang bersangkutan;
 - perumahan guru2 dijamin atau disediakan dengan cara yang layak oleh 2. a). Panitya atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakankeringanan ba gi guru2 yang bersangkutan.
 - Sewa rumah atau hotel, disesuaikan dengan peraturan? Pemerintah yang berlaku untuk itu.
 - 3. Kepala Sekolah atau guru2 yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.
 - Terhadap sekolah2 yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengajar, pe gawai dan murid2 dikenakan ketentuan2 tentang pengajar, pegawai dan murid2 negara, dengan catatan, bagi yang tidak mememuhi syarat , penyalurannya menjadi tanggung jawab Panitya atau Yayasan atau pengambil inisiatip dari sekolah yang bersangkutan.
 - 5. Khus us murid? yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk MGR.SLP.Negara dan penampungan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk? Inspeksi SMP. Daerah yang bersangkutan.
 - 6. a). tiap2 kelas terdiri dari atas sekurang-kurangnya 20 erang murid dan sebanyak-banyaknya 40 murid.
 - tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berjalan mampun dalam tamın2 berikutnya harus seisin Kepala Inspeksi S.P. Daarah.

Kelima

: Jikalen syarat2 tersebut diatas ini ternyata tidak dipemuhi oleh Badan Penyelenggara sekolah abau Yayasan atau Panitya, maka kirunya Kalas sewaktuwaktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negara atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid2 dikelas I.

Keengn

: biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, sekedar untuk th 1964 dibebankan pada pasal SE.3.15 dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen P.D. dan .K.tahun dinas 1964 dan untuk tahun? selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Atas nama Menteri Kepala

Ketujuh

: Surat Keputusan ini berlaku sulai pada tanggal 1 Agustus 1964.

SALINAN : d . a . b.

Mengetahuli

epala MiP. Nageri Wanadadi.

Kepala Inspektorat Tata- Laksana t.t.d. (J. BASIRAN) .--

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN R.I.

Umum Atas nama Seliam

Yang mengutip,dari kutipan ;

S Dipindai dengan CamScanner

Direktorat Pendidikan

Kutipan.

: Surat Keputusan Menteri P.D.dan.K. LAMPIRAN III

tanggal 30 Juli 1964 No.80/S.K./B/III

TENTANG: Penegerian SMP.Swasta tamun pelajaran

1964/1965 .-

No ' Nama dan tempat Sekolah yang Urut' dinegerikan	'Jumlah 'Kolas.	Keteranga	_
1 !	!	•	
dst.	the state of the s		
9. SAP.Usaha Masyarakat di Monodadi, Kabupaten Banjarnes	4 buah kelas I gara 1 buah kelas II.	a. Menjadi SMP.Negara di Wonodadi. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.	
Jawa Te ngah.			
10. (_		
• A Section of	The second secon	1 1 2 2 2 2 2 2 2	

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

Kepala Inspeksi Tata - Laksana

t.t.d. Cap

(J. BASIRAN) .-

Mengetahui:

MP.Negeri Wanadadi

Yang mengutip